



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN SULAWESI TENGAH**

KAJIAN FISKAL REGIONAL



**Triwulan I
2018**

Penyusun:

Penanggung Jawab: Wawan Hermawan Ketua Tim: Yohanis Mendila
Editor: Dodik Hari Mulyono Desain Grafis: Aditya Dimas S
Anggota: Dodik Hari Mulyono Didi Sundoro, Watono, Maria Lolongan,
Rahman S. Halim, Aditya Dimas S

**KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1
B. INFLASI	2
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN	3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	4
A. PENDAPATAN NEGARA	5
B. BELANJA NEGARA	8
C. PROGNOISIS REALISASI APBN SAMPAI AKHIR TAHUN 2018	10
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	11
A. PENDAPATAN DAERAH	12
B. BELANJA DAERAH	15
C. PROGNOISIS REALISASI APBD SAMPAI AKHIR TAHUN 2018	16
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN	17
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	17
C. BELANJA KONSOLIDASIAN	19
D. ANALISIS KONTRIBUSI DAERAH DALAM PDRB	21
BAB V BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	
A. 14 INVESTOR BERMINAT TANAM MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.....	23
B. OPTIMIS TARGET INVESTASI 2018 DI SULTENG TERCAPAI	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018		4
Tabel 2.2	Profil BLU Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah		8
Tabel 2.3	Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Semester II Tahun 2017		9
Tabel 2.4	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2018		9
Tabel 3.1	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018		11
Tabel 3.2	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2018		16
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah s.d.Triwulan I Tahun 2018		17
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2017 dan 2018		19
Tabel 4.3	Capaian, Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018		21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	PDRB Nominal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 dan 2018		1
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan Nasional (persen)		1
Grafik 1.3	Inflasi Sulawesi Tengah dan Nasional Januari 2017 – Maret 2018.....		2
Grafik 1.4	Perkembangan Nilai Tukar Petani Periode Januari-Maret 2018		3
Grafik 2.1	Realisasi Penerimaan PPh per-KPPN Lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		5
Grafik 2.2	Realisasi Penerimaan PPN per-KPPN Lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		5
Grafik 2.3	Realisasi Penerimaan PPhBM per-KPPN Lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		6
Grafik 2.4	Realisasi Penerimaan Cukai Lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		6
Grafik 2.5	Realisasi PNBPN Lainnya Lingkup Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		7
Grafik 2.6	Realisasi PNBPN BLU Lingkup Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 .		7
Grafik 2.7	Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		8
Grafik 2.8	Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		8
Grafik 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		12
Grafik 3.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		13
Grafik 3.3	Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		13
Grafik 3.4	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		14
Grafik 3.5	Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		14
Grafik 3.6	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		15
Grafik 3.7	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2018 ..		15
Grafik 3.8	Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2018		16

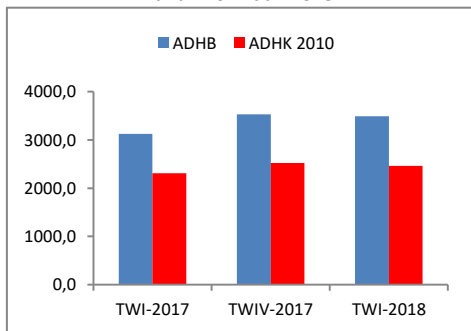
Grafik 4.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017		18
Grafik 4.2	Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah.s.d. Triwulan I Tahun 2018		18
Grafik 4.3	Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		19
Grafik 4.4	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018		20
Grafik 4.5	Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 dan 2017		20

I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

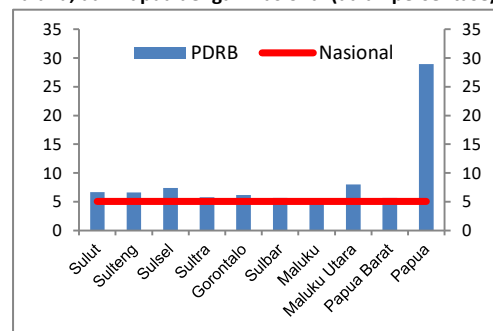
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kebijakan fiskal pemerintah daerah dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor pusat K/L, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) merupakan salah satu variable pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping konsumsi dan investasi.

Grafik 1.1 PDRB Nominal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 dan 2018



Sumber : BPS Sulawesi Tengah (data diolah)

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan Nasional (dalam persentase)



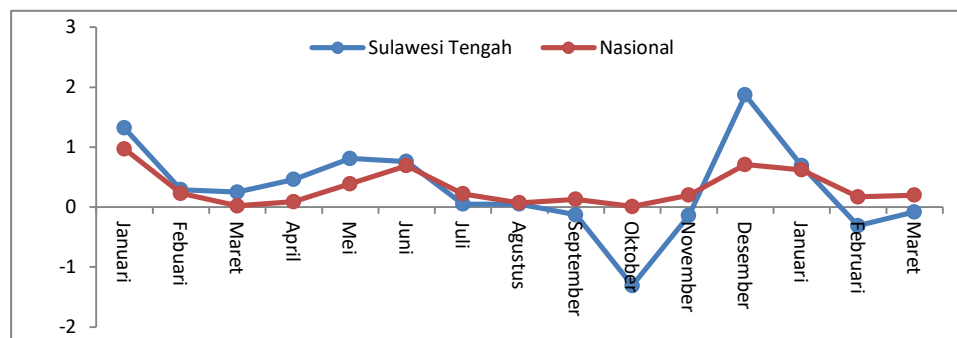
Perekonomian Sulawesi Tengah triwulan I-2018 jika dibandingkan dengan triwulan I-2017 tumbuh sebesar 6,62 persen. Pertumbuhan tersebut dicapai oleh peningkatan produksi pada seluruh lapangan usaha. Pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 15,43 persen, diikuti lapangan usaha industri pengolahan sebesar 12,64 persen serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,27 persen. Secara spasial ekonomi Indonesia triwulan I-2018 tumbuh 5,06 persen (y-on-y). Sementara itu, PDRB se-Sulampua mengalami pertumbuhan sebesar 10,16 persen dibanding triwulan I-2018. Pertumbuhan tertinggi di Pulau Papua sebesar 28,93 persen dan terendah di Pulau Maluku sebesar 5,25 persen.

B. Inflasi

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu pada Maret 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar 0.23 (mtm). Mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februari yang tercatat sebesar 0.31 (mtm). Sedangkan secara tahunan (yoy) inflasi pada bulan Maret tercatat sebesar 2,71 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3.05 persen (yoy). Terjadi penurunan indeks pada bahan makanan sebesar 1,88 persen, sedangkan kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok sandang (1,60 persen), kesehatan (1,00 persen), pendidikan, rekreasi, dan olahraga (0,40 persen) dan lain-lain sebesar 0,73 persen.

Pada tingkat nasional, inflasi bulan Maret tercatat sebesar 0,20 (mtm), mengalami kenaikan sebesar 0,3 dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,17 (mtm). Sedangkan secara tahunan (yoy) tercatat sebesar 3,40 persen. Sebanyak 57 kota di Indonesia mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura (2,10 persen) dan inflasi terendah di Sumenep (0,01 persen). Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Tual (2,30 persen) dan terendah di Bulukumba (0,01 persen).

**Grafik 1.3 Inflasi Sulawesi Tengah dan Nasional
Januari 2017 – Maret 2018**



Sumber : BPS Sulawesi Tengah

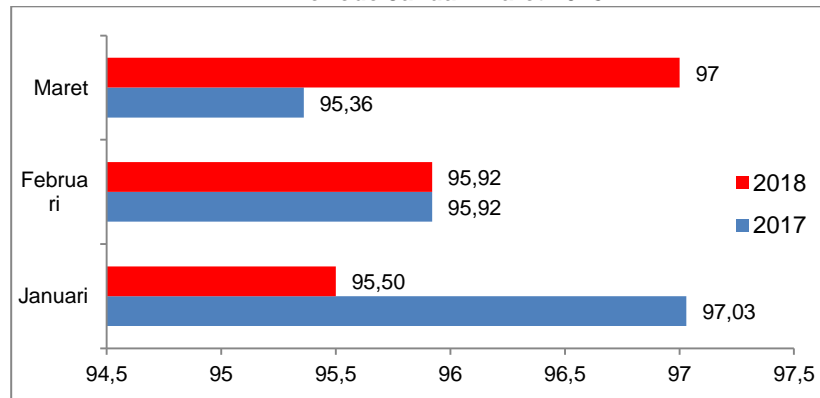
C. Indikator Kesejahteraan

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar

produk pertanian terhadap barang jasa baik yang dikonsumsi rumah tangga maupun keperluan produksi pertanian.

**Grafik 1.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Periode Januari-Maret 2018**



Sumber: BPS Sulawesi Tengah

Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tengah triwulan I-2018 sebesar 97 persen, naik 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan dibanding tahun sebelumnya (yoy), nilai tukar petani mengalami peningkatan 1,65 persen. Hal ini disebabkan kenaikan NTP pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat.

II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

APBN Tingkat Provinsi merupakan gambaran kondisi keuangan di provinsi tersebut. I-account APBN dapat mencerminkan kebijakan fiscal yang diterapkan oleh masing-masing kepala daerah di tiap provinsi. Berikut gambaran umum APBN di Triwulan I Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah
s.d Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	3960	652	299	779
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	3960	652	299	779
1. Penerimaan Pajak	3611	600	0	646
2. PNBPN	349	52	299	133
II. HIBAH	0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	23.826	4.636	23.319	4.928
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	7.236	806	7.342	900
1. Belanja Pegawai	2.108	385	2.196	403
2. Belanja Barang	2.527	230	3.022	348
3. Belanja Modal	2.581	191	2.111	149
4. Belanja Bantuan Sosial	20	0	13	0
5. Belanja Lain-lain	0	0	0	0
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	16.590	3.830	15.977	4.028
1. Transfer ke Daerah	15.157	3.830	14.613	3.756
a. Dana Perimbangan	13.348	3.358	12.596	3.399
1) Dana Alokasi Umum	9.389	3.130	9.545	3.174
2) Dana Bagi Hasil	1.775	228	1.193	225
3) Dana Alokasi Khusus	2.184	0	1.858	0
b. Dana Otonomi Khusus	95	62	136	59
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	0	0	0	0
d. Dana Transfer Lainnya	1.714	410	1.881	298
2. Dana Desa	1.433	0	1.364	272
C. SURPLUS DEFISIT	(19.866)	(3.984)	(23.020)	(4.149)

Sumber : SPAN (data diolah)

Realisasi penerimaan negara mengalami pertumbuhan 19,48 persen dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp0,652 triliun (yoy). Alokasi belanja negara menurun 2,13 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp4,626 triliun (yoy) namun realisasi sampai dengan triwulan I-2018 tumbuh 6,30 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2017.

A. Pendapatan Negara

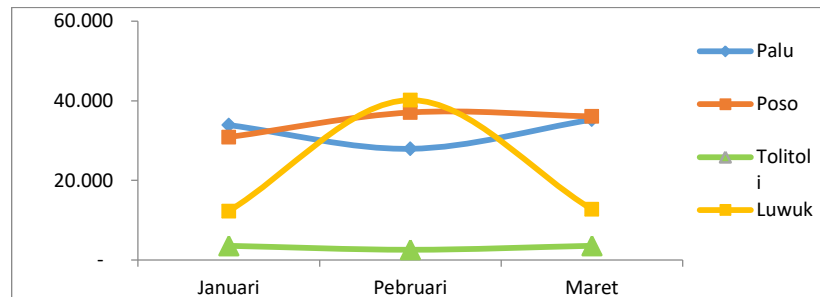
1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional.

a. Pajak Penghasilan (PPH)

Penerimaan PPh Triwulan I-2018 sebesar Rp276 miliar, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp282 miliar. Terbesar penerimaan PPh berasal dari Kab. Poso sebesar Rp104,023 atau 37,59 persen dan terkecil oleh Kab. Tolitoli sebesar Rp9,700 miliar atau 3,51 persen.

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPH Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

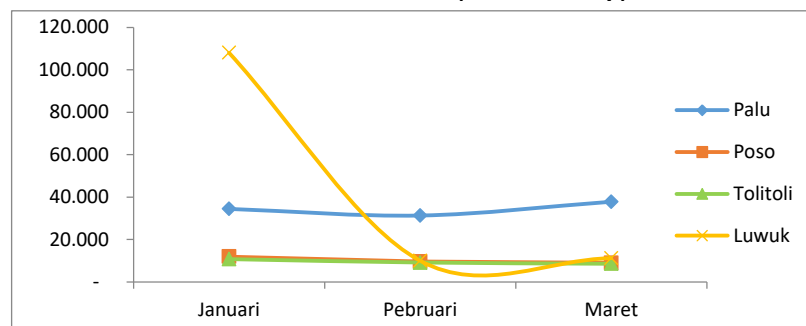


Sumber: SPAN (data diolah)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN pada triwulan I-2018 sebesar Rp291 miliar tumbuh 3,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp282 miliar. Penerimaan terbesar dari Kab. Banggai pada bulan Januari dengan kontribusi sebesar Rp108 miliar atau 56,60 persen dari total penerimaan PPN triwulan I-2018. Pada bulan-bulan selanjutnya penerimaan PPN mengalami flutuasi.

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

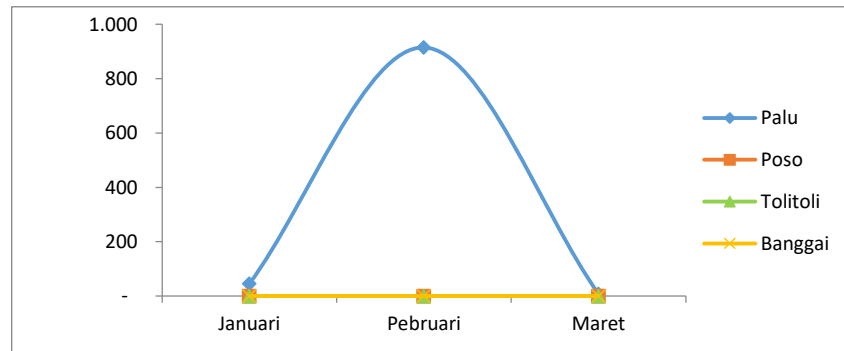


Sumber: SPAN (data diolah)

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM pada Triwulan I-2018 masih terealisasi di Kota Palu dengan total Rp0,968 miliar sedangkan untuk kota lain belum memberikan kontribusi sampai triwulan I-2018.

Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

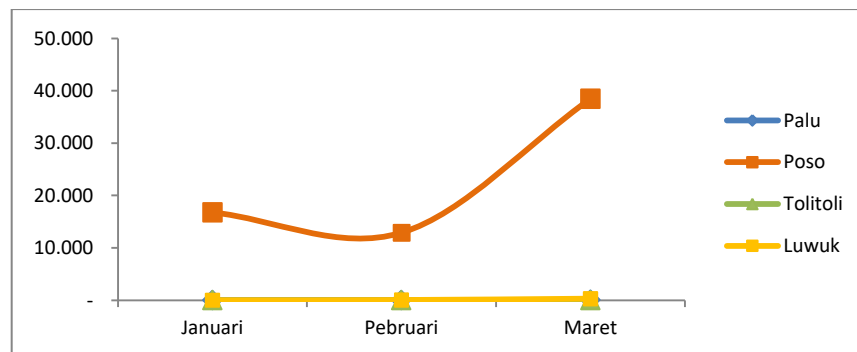


Sumber : SPAN (data diolah)

d. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai sampai dengan triwulan I-2018 sebesar Rp68,6 miliar dengan penyumbang terbesar oleh Kab. Poso mencapai Rp68,154 miliar atau 99,31 persen sedang Kota Palu dan Kab. Banggai masing-masing menyumbang 0,16 persen dan 0,53 persen dari penerimaan Cukai triwulan I-2018.

Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan Cukai Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)



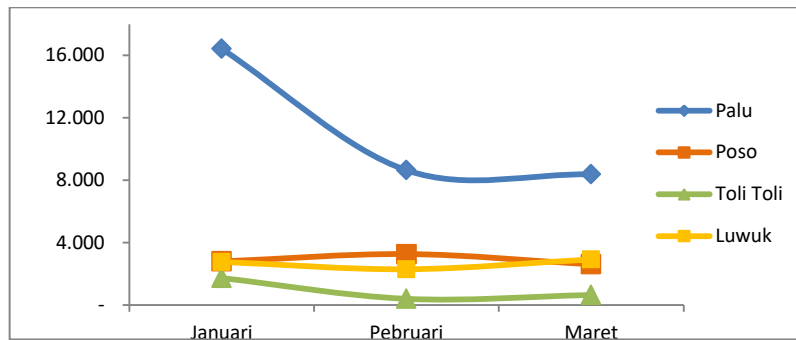
Sumber: SPAN (data diolah)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya sampai dengan triwulan I-2018 mencapai Rp52,8 miliar tumbuh 1,05 persen dibanding penerimaan pada periode yang sama tahun 2017. KPPN Palu mencatat penerimaan sebesar Rp23,716 miliar tau 44,85 persen dari total penerimaan PNBP.

Grafik 2.5 Realisasi PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

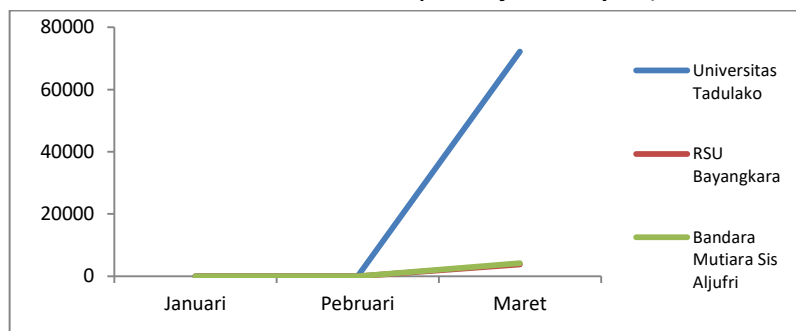


Sumber: SPAN (data diolah)

b. Penerimaan PNBP BLU

Di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu terdapat 3 (tiga) BLU yang beroperasi yaitu Universitas Tadulako yang bergerak di bidang pendidikan, Rumah Sakit Umum (RS) Bhayangkara yang bergerak di bidang kesehatan dan Bandara Mutiara Sis Aljufri di bidang barang/jasa lainnya. Pada triwulan I-2018 penerimaan PNBP BLU mencapai Rp80,1 miliar dengan penerimaan terbesar .

Grafik 2.6 Realisasi PNBP BLU Lingkup Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: SPAN (data diolah)

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan I-2018 berakhir, tidak terdapat target dan realisasi pendapatan hibah di Provinsi Sulawesi Tengah.

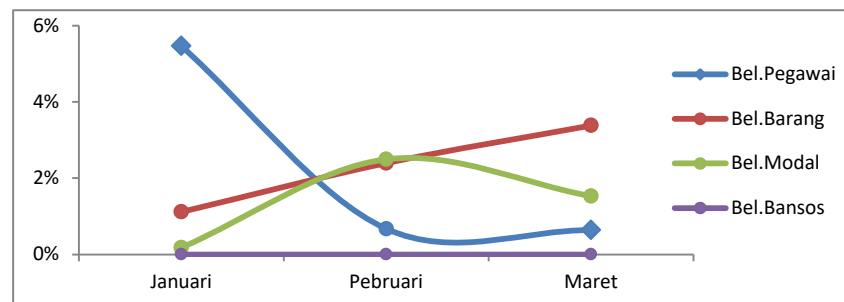
B. BELANJA NEGARA

Belanja Negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal. Secara garis besar, stimulus fiskal adalah berupa tambahan belanja pemerintah (*increased spending*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu sektor riil.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Tren belanja pemerintah pusat pada triwulan I-2018 mengalami tren yang fluktuatif kecuali belanja barang yang memiliki kecenderungan terus meningkat. Realisasi belanja masih didominasi oleh belanja pegawai (44,80 persen), belanja barang (38,64 persen) dan belanja modal (16,56 persen) dari total realisasi belanja triwulan I-2018 sebesar Rp900,838 miliar.

Grafik 2.7 Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018

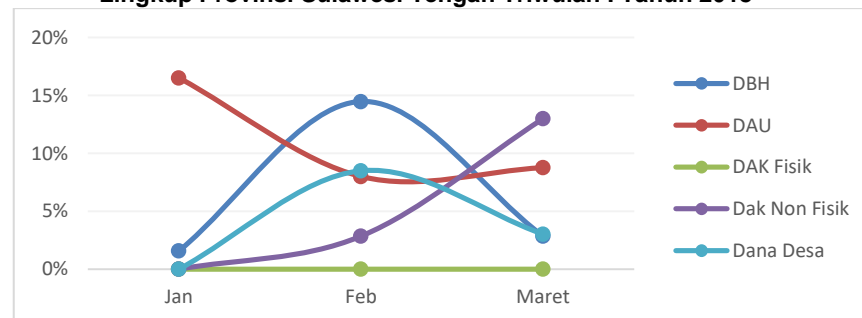


Sumber : SPAN (data diolah)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tren Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa cenderung fluktuatif pada triwulan I-2018 kecuali DAK Fisik yang meningkat seiring mulai tersalurkan ke Pemda di wilayah Sulawesi Tengah.

Grafik 2.8 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018



Sumber : SPAN (data diolah)

3. Pengelolaan BLU

Tabel 2.2. Profil BLU Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam Juta Rp)

No	Nama BLU	Jenis Layanan	Aset		Pagu 2018	
			2016	2017	RM	BLU
1.	Universitas Tadulako	Pendidikan	1.016.199	2.854.710	233.344	179.598
2.	Rumkit Bhayangkara	Kesehatan	12.884	18.504	8.542	20.189
3.	Bandara Mutiara Palu	Barang dan Jasa Lainnya	873.328	3.667.580	99.068	26.500
Jumlah			1.902.411	6.540.794	340.954	226.287

Sumber: SPAN (diolah)

Terdapat tiga BLU di Sulawesi Tengah yang mengelola aset sebesar Rp6,54 triliun. Dari sisi kemandirian BLU, Rumkit Bhayangkara dapat dikatakan sangat mandiri dengan alokasi anggaran BLU sebesar 70,27 persen, selanjutnya Universitas Tadulako dengan alokasi anggaran BLU sebesar 43,49 persen dan Bandara Mutiara Palu masih tergantung dana dari pemerintah pusat dengan tingkat kemandirian BLU sebesar 21,10 persen.

4. Manajemen Investasi Pusat

**Tabel 2.3. Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Sulawesi Tengah
s.d. Semester II Tahun 2017**

No	Nomor SLA	Nama SLA	Penerima SLA	Hak Tagih	Tingkat Bunga (%)
1	2097101	SLA-1059/DP3/1998	PDAM Kab Tolitoli	0,00	11.5
2	2130201	SLA-1058/DP3/1998	Pemkab. Buol	-	-
3	2198001	SLA-1241/DSMI/2011	Pemkab. Morowali	16.522.567.533,32	8.29
4	2180201	SLA-1203/DP3/2006	Pemkab. Parigmo	8.394.229.001	8.29
5	2130301	SLA-1056/DP3/1998	Pemkab. Poso	-	-
6	2130401	RDA-284/DP3/1997	Pemkot Palu	5.882.653.181,00	11.5
7	2130501	RDA.P5-254/DP3/1996	Pemkot Palu	3.967.688.655,96	10.5
8	2130601	SLA-1083/DP3/1998	Pemkot Palu	2.695.661.333,23	11.5

Sumber: Dit SMI (data diolah)

Penerusan pinjaman kepada Pemda di Sulawesi Tengah sampai dengan semester II-2017 diberikan kepada 6 debitur dengan 8 LOAN. Sisa hak tagih pemerintah sebesar Rp37,462 miliar mengalami penurunan sebesar 10,12 persen atau Rp3,793 miliar dibandingkan pada semester I-2017.

C. PROGNOSIS REALISASI APBN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV-2018

Perkiraan realisasi pendapatan dengan menggunakan analisis *trend* dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2017 selanjutnya dikaitkan dengan target penerimaan tahun 2018. Perkiraan realisasi belanja juga digunakan analisis *trend* realisasi belanja tahun 2013 s.d 2017, selanjutnya dikaitkan dengan target realisasi belanja tahun 2018 sebesar 90 persen, program prioritas pemerintah dan kebijakan adanya pengendalian dan penghematan belanja.

**Tabel 2.4 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah
s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam juta rp)**

Uraian	Realisasi s.d. Triwulan I			Perkiraan Realisasi s.d Triwulan IV	
	Pagu	Realisasi	% Realisasi terhadap Pagu	Rp	% Realisasi terhadap Pagu
Pendapatan Negara	299.097	779.978	260,78	3.554.763	92,51
Belanja Negara	23.325.045	4.930.952	21,14	22.294.078	95,58
Surplus/Defisit	(23.025.948)	(4.150.973)	18,03	(18.739.315)	3,07

BOKS
I

GUNAKAN DANA DESA, LAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pemerintah Desa (pemdes) Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali patut diapresiasi dalam pengelolaan Dana Desa. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 berhasil melayani kebutuhan warga sepenuhnya dengan menggunakan Dana Desa.

Pada tahun 2015, Pemdes Siumbatu merealisasikan Dana Desa sebesar Rp370,1 juta yang digunakan untuk pembangunan kantor Desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemdes dengan melaksanakan pembangunan tersebut mendapat apresiasi dari seluruh warga desa. Pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh warga desa akan selalu diprioritaskan demi meningkatkan pelayanan dan bermanfaat bagi seluruh warga desa.

Tahun anggaran 2016, Pemdes kembali merealisasikan anggaran Dana Desa yang diperoleh untuk pembangunan infrastruktur yang masuk kedalam skala prioritas dengan anggaran sebesar Rp577,5 juta. Pembangunan difokuskan untuk pembangunan jalan rabat sepanjang 486 meter dan pembangunan rumah layak huni untuk warga sebanyak satu unit.

Tahun 2017, Dana Desa yang diperoleh digunakan untuk pembangunan jalan rabat sepanjang 568 meter dengan anggaran sebesar Rp63,8 juta serta pembangunan rumah layak huni bagi warga yang tidak mampu sebanyak lima unit rumah dengan anggaran Rp45 juta.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemdes Siumbatu juga membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dibidang penjualan elpiji dengan harapan BUMDes bisa membantu meningkatkan perekonomian warga.

Saat ini perkembangan desa sangat signifikan dan Pemdes akan terus berupaya melaksanakan program dengan alokasi anggaran dari Dana Desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya BUMDes diharapkan ekonomi masyarakat terus meningkat.

Sumber: Radar Sulteng, 31 Januari 2018

III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Arah kebijakan fiskal Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada profil *I-account-nya*, sebagaimana Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	18.110	3.842	19.069	4.415
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.136	283	2.730	354
Pendapatan Pajak Daerah	1.095	221	1.221	235
Hasil Retribusi	166	15	424	27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	45	0	45	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	830	48	1.039	92
Pendapatan Transfer	15.580	3.552	15.984	3.992
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	14.042	3.514	14.199	3.620
Dana Bagi Hasil Pajak	554	53	416	59
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	398	89	770	160
Dana Alokasi Umum	9.503	3.029	9.540	3.294
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	52			
Dana Alokasi Khusus	3.536	343	3.473	107
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.446	38	1.405	369
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.446	38	1.405	369
Transfer Pemerintah Provinsi	91	1	380	4
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91	1	380	4
Transfer Bantuan Keuangan	1	0	0	0
Bantuan Keuangan dari Pemda Provinsi	1	0	0	0
Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	394	6	355	69
Pendapatan Hibah	40	1	225	6
Dana Darurat	0	0	0	0
Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya	267	5	0	0
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya	87	0	0	0
Pendapatan lainnya	0	0	131	63
BELANJA	17.659	1.615	18.894	2.075
Belanja Pegawai	7.320	1.086	7.594	1.180
Belanja Barang	3.811	292	4.420	350
Belanja Bunga	8	1	4	0
Belanja Subsidi	1	0	4	1
Belanja hibah	731	136	888	202
Belanja Bantuan Sosial	32	1	52	10
Belanja Bantuan Keuangan	1.850	1	1.875	71
Belanja Modal	3.881	98	4.024	99
Belanja tidak terduga	26	1	34	6
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	827	4	565	2
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	813	3	565	2
Transfer Bantuan Keuangan lainnya	14	1	0	0
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	18.486	1.618	19.459	1.921
SURPLUS/DEFISIT	-376	2.223	-390	2.494

Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

Target pendapatan Pemda di Sulawesi Tengah tahun 2018 sebesar Rp19,069 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp0,959 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama triwulan I-2018 realisasi pendapatan sebesar Rp4.415 triliun atau mencapai 23,15 persen dari target pendapatan tumbuh 12,98 persen (yoy). Dari sisi belanja dan transfer, pagu belanja dan transfer sebesar Rp19,459 triliun mengalami kenaikan Rp0,973 triliun (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,921 triliun tumbuh 15,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017

A. Pendapatan Daerah

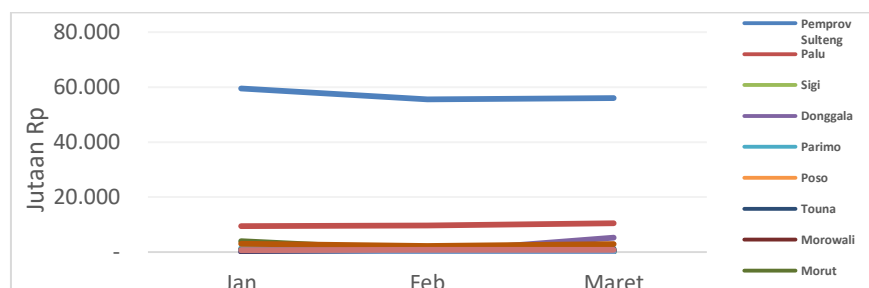
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD agregat Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan I-2018 tercapai sebesar Rp0,354 triliun atau 12,97 persen dari target PAD tahun 2018 sebesar Rp2,730 triliun tumbuh sebesar 25,09 persen dibanding penerimaan PAD pada periode yang sama tahun 2017.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah sampai dengan triwulan I-2018 mencapai Rp0,253 triliun tumbuh sebesar 6,33 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp0,221 triliun. Penerimaan pajak daerah selama triwulan I-2018 cenderung stabil dengan penerimaan pajak antara 31-34 persen per bulan dari total penerimaan pajak daerah dengan menyumbang 66,38 persen dari total PAD triwulan I-2018. Secara rinci penerimaan pajak daerah per kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tersaji pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)



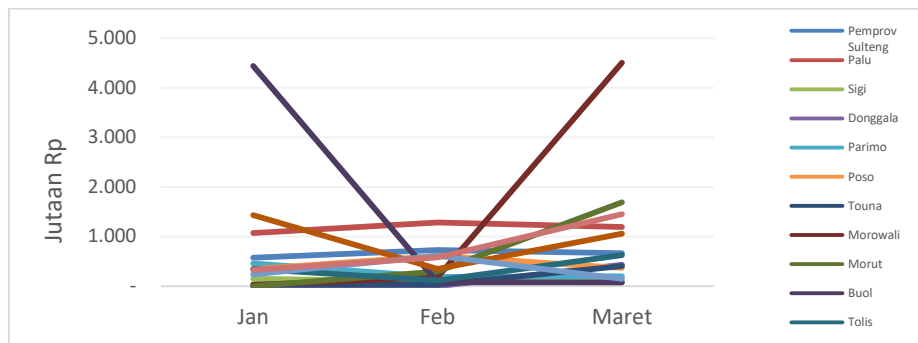
Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Kontribusi agregat penerimaan retribusi di Sulawesi Tengah terhadap PAD dapat dikatakan relatif kecil yaitu sebesar 7,3 persen dari total PAD dengan penerimaan yang fluktuatif perbulannya. Penerimaan retribusi tumbuh sangat

signifikan yaitu sebesar 80 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Penerimaan terbesar dibukukan oleh Kab. Morowali, Kab. Buol dan Kota Palu masing-masing sebesar 17,17 persen, 16,73 persen dan 12,93 persen. Secara rinci penerimaan retribusi daerah per kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tersaji pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)



Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

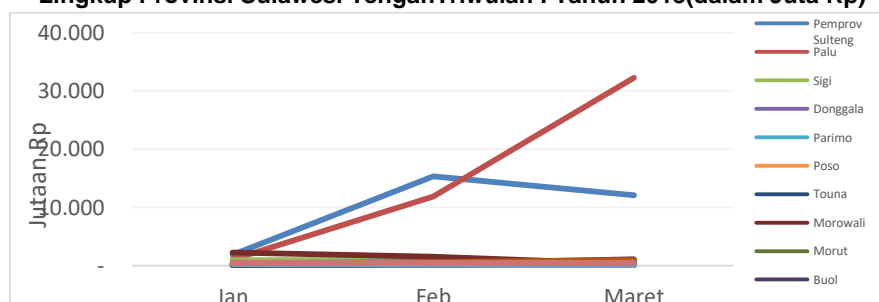
c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lingkup Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdapat Kabupaten Banggai Kepulauan yang membukukan penerimaan pada bulan Januari 2018 sebesar Rp5 juta.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan triwulan I-2018 terealisasi sebesar Rp0,92 triliun tumbuh sebesar 91,67 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp0,48 triliun. Kotribusi terbesar penerimaan oleh Kota Palu dan Pemprov Sulteng masing-masing sebesar 49,02 persen dan 31,72 persen artinya sebesar 80,74 persen dibukukan oleh Kota Palu dan Pemprov Sulteng dan sisanya sebesar 19,26 persen oleh Pemda yang lain (Grafik 3.3).

Grafik 3.3. Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

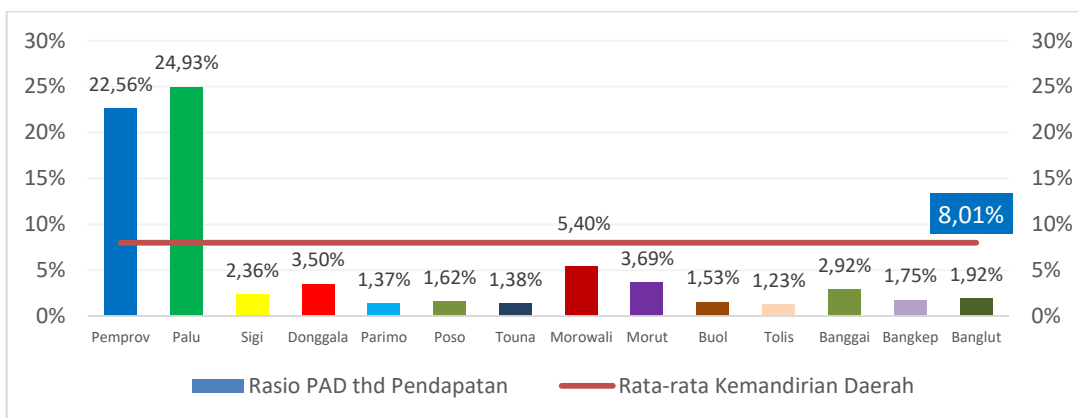


Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada triwulan I-2018, berdasarkan realisasi PAD terhadap terhadap Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah rata-rata hanya sebesar 8,01 persen. Namun jika dianalisis lebih jauh, dengan menghilangkan Pemprov Sulteng dan Kota Palu maka rata-rata kemandirian keuangan daerah dari realisasi PAD terhadap Total Pendapatan hanya sebesar 2,28 persen. Secara rinci kemandirian keuangan daerah berdasarkan realisasi PAD terhadap terhadap Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tersaji pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018

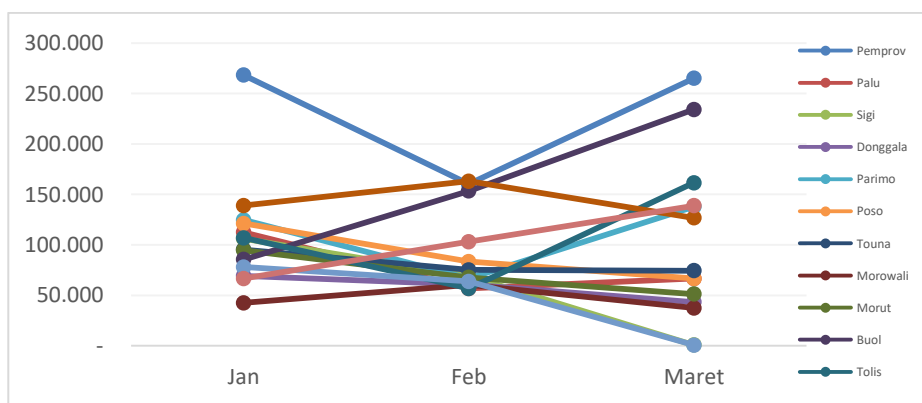


Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer oleh provinsi/kabupaten/kota tersaji sebagai berikut:

Grafik 3.5. Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Jutaan Rp)



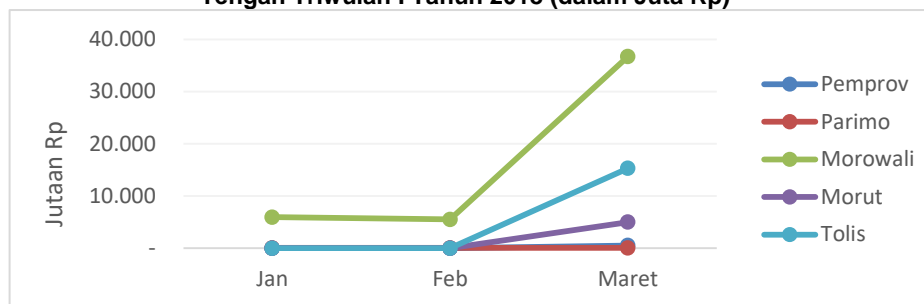
Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

Realisasi pendapatan transfer pada triwulan I-2018 sebesar 24,97 persen dari target pendapatan transfer sebesar Rp15,984 triliun tumbuh 12,39 persen (yoy).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada triwulan I-2018 secara agregat baru mencapai 19,44 persen dari target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp0,355 triliun, tumbuh 115 persen dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun 2017. Sebagaimana tersaji pada Grafik 3.6, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah di Sulawesi Tengah baru terealisasikan pada 5 Pemda dengan penerimaan terbesar pada Kab. Morowali mencapai Rp0,048 triliun atau 69,68 persen dari total penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada triwulan I-2018.

Grafik 3.6. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)



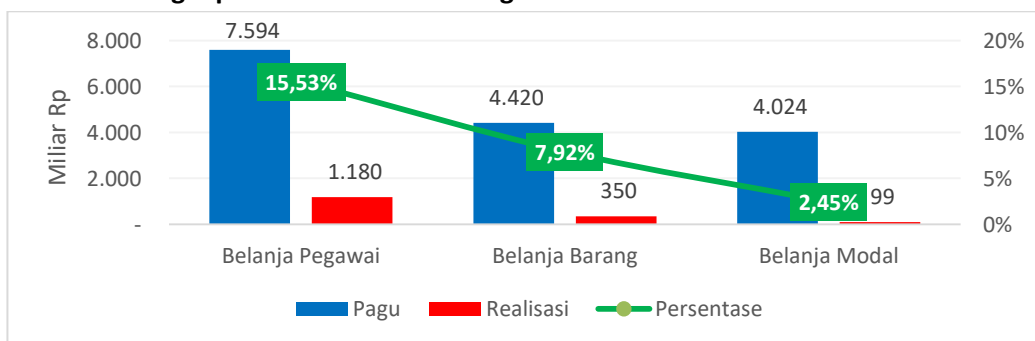
Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Alokasi belanja tahun 2018 sebesar Rp19,459 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp1,920 triliun atau 9,87 persen dari alokasi belanja. Alokasi belanja terbesar pada belanja pegawai sebesar 7,594 triliun (39,03%), belanja barang sebesar Rp4,419 triliun (22,71%), belanja modal Rp4,023 triliun (20,68%) dan belanja lainnya sebesar Rp.3,421 triliun (17,58%). Alokasi belanja modal secara agregat telah memenuhi ketentuan dimana alokasi belanja modal minimal 20 persen dari total belanja.

Grafik 3.7. Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2018

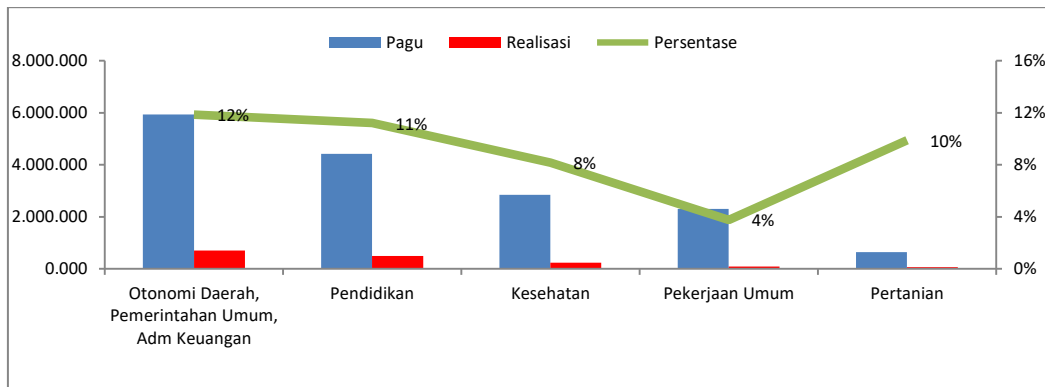


Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

Pada triwulan I-2018 realisasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dengan realisasi mencapai 61,40 persen dari total belanja atau 15,53 persen dari pagu belanja pegawai. Belanja barang dan belanja modal terealisasi sebesar 18,23 persen dan 5,14 persen dari total belanja atau 7,92 persen dan 2,45 persen dari alokasi belanja.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.8. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018



Sumber: BPKAD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Tengah (diolah)

Belanja daerah berdasarkan klasifikasi urusan dengan lima urusan tertinggi tersaji pada grafik 3.8 yaitu belanja otonomi daerah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pertanian. Belanja otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan memiliki alokasi anggaran terbesar Rp5,9 triliun dengan penyerapan sebesar 12 persen sampai triwulan I-2018 atau Rp704 miliar.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Perkiraan pendapatan dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2018 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	19.069	4.415	23,15%	18.033	94,57%
Belanja Daerah	19.459	1.921	9,87%	17.820	91,58%
Surplus/Defisit	(390)	2.494	13,28%	213	2,99%

Perkiraan realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan analisis *trend* dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2017 selanjutnya dikaitkan dengan target tahun 2018, penerimaan mencapai Rp18,033 triliun atau 94,57 persen dan realisasi belanja diperoleh perkiraan realisasi sebesar Rp 17,820 triliun atau 91,58 persen dari pagu penerimaan dan belanja tahun 2018.

IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONDOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengonsolidasikan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah s.d.Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	4.810.079	4.776.377	1.169.740	13,14%	1.016.025
Pendapatan Perpajakan	646.968	243.802	890.769	29,54%	627.606
Pendapatan Bukan Pajak	132.998	142.218	275.216	-41,00%	388.058
Hibah	0	0	0	0,00%	361
Transfer	4.030.113	4.390.357	3.754	100,00%	0
Belanja Negara	4.930.952	1.958.330	2.859.168	-37,92%	3.943.273
Belanja Pemerintah	900.839	1.958.226	2.859.064	-32,26%	3.781.361
Transfer	4.030.113	104	104	-155648,30%	161.911
Surplus/(Defisit)	-120.873	2.818.048	-1.689.429	-73,27%	-2.927.247
Pembiayaan	0	146.506	146.506	88,65%	16.623
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	156.831	156.831	-6,42%	166.897
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	10.325	10.325	-1355,44%	150.274
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-120.873	2.964.554	-1.542.923	-88,64%	-2.910.625

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Catatan:

*) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

A. Pendapatan Konsolidasian

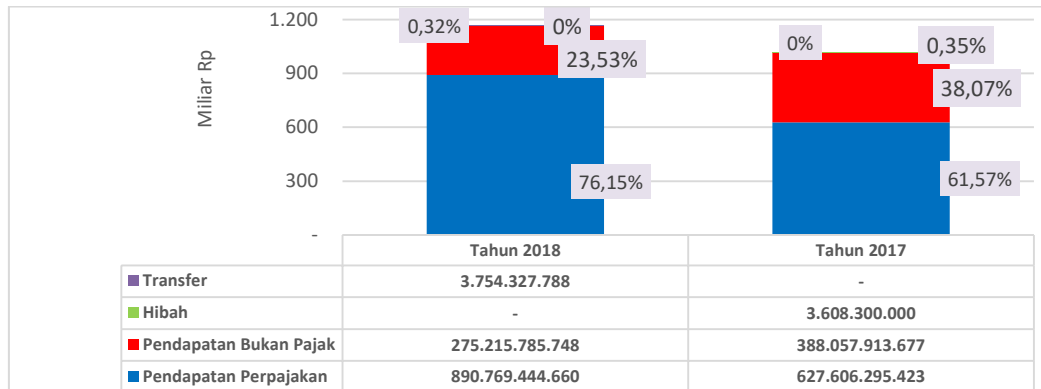
Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian dan PNBP Konsolidasian terhadap total Pendapatan konsolidasian. Perbandingan komposisi pendapatan, yaitu: antara Pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, antara pendapatan perpajakan dan PNBP, dan lain-lain.

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, hibah dan transfer dana bantuan ke desa.

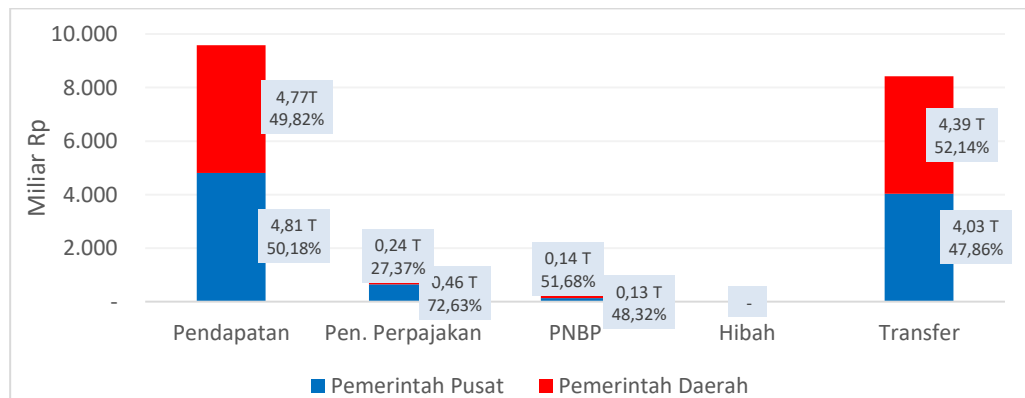
Grafik 4.1. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Pendapatan perpajakan masih mendominasi pendapatan pada triwulan I-2018 yang mencapai 76,15% dari pendapatan konsolidasi, tumbuh 29,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Pendapatan PNBP mengalami pertumbuhan negatif sebesar 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp388,057 miliar.

Grafik 4.2. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2018

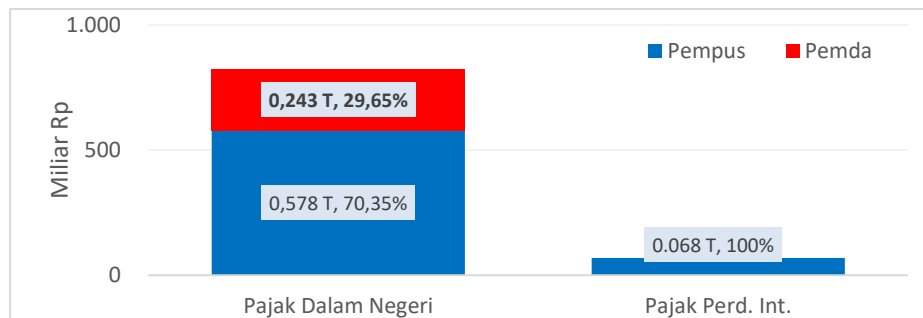


Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Penerimaan konsolidasian sampai triwulan I-2018 mencapai Rp1,016 triliun tumbuh sebesar 13,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Komposisi penerimaan masih didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 61,77 persen, selanjutnya PNBP sebesar 38,19 persen dan hibah sebesar 0,04 persen dari total penerimaan sampai dengan triwulan I-2018.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3. Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan masih didominasi penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai 92,30 persen dari penerimaan pajak sebesar Rp0,822 triliun, dari penerimaan tersebut 7,70 persen merupakan penerimaan pajak perdagangan internasional yang diterima oleh pemerintah pusat.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017	2018	
	Realisasi	Realisasi	Kenaikan
Pendapatan Perpajakan	627.606.295.423	890.769.444.660	41,93%
PNBP	388.057.913.677	275.215.785.748	-29,08%
Hibah	3.608.300.000	-	-100,00%
Total	1.019.272.509.100	1.165.985.230.408	14,39%
PDRB/Pert. Ekonomi	31,257 M	34.920 M	11,72%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan I-2018 tumbuh 6,62 persen lebih cepat dibanding triwulan I-2017 (yoy) sebesar 3,97 persen. Perekonomian Sulteng triwulan I-2018 atas berlaku sebesar Rp34,92 triliun dengan kenaikan 11,72 persen dibanding triwulan I-2017. Kenaikan pendapatan konsolidasian sebesar 14,39 persen terlihat berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 sebesar 11,72 persen.

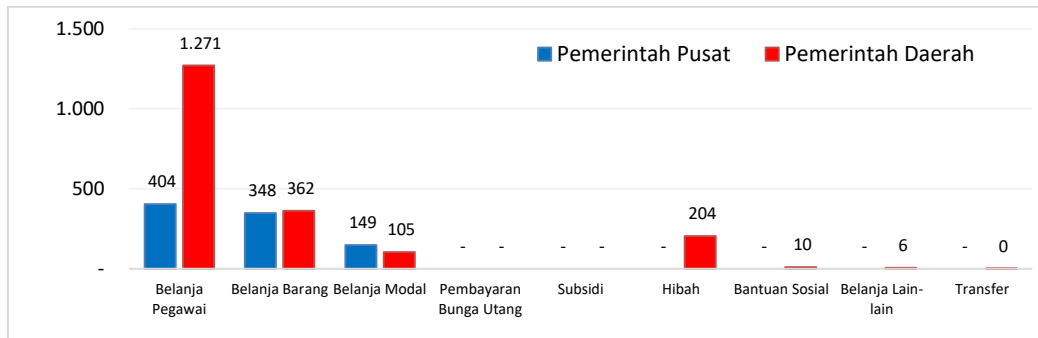
B. Belanja Konsolidasian

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode

pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.4. Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)

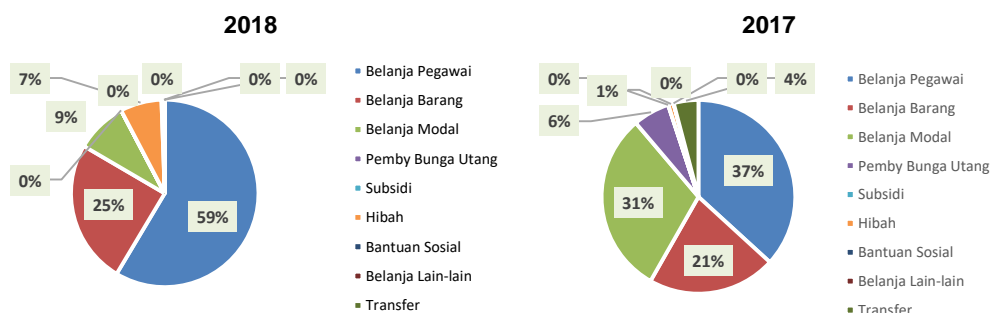


Sumber: LKPK Kanwil DJPb (diolah)

Dari sisi belanja konsolidasian triwulan I-2018, belanja dan transfer pemerintah pusat hanya sebesar 31,51 persen dari total belanja di Sulawesi Tengah sebesar Rp1,958 triliun. Dengan komposisi alokasi belanja konsolidasian didominasi belanja pegawai sebesar 58,58 persen, disusul belanja barang sebesar 24,84 persen, belanja modal sebesar 8,89 persen dan belanja lainnya 7,69 persen.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.5. Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2018 dan 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPb (diolah)

Realisasi belanja konsolidasian di Sulawesi Tengah triwulan I-2018 secara agregat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 37,91 dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan secara signifikan hanya pada belanja pegawai sebesar 15,44 persen (yoy) namun belanja barang dan modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,03 persen dan 78,92 persen.

Penurunan realisasi pada belanja modal sangat signifikan diharapkan baik pemerintah pusat dan daerah segera memprioritaskan belanja modal terutama belanja infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Tabel 4.3 Capaian, Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

No.	Indikator	Realisasi Capaian 2017	Target KUA & PPAS 2018	Target RPJMD 201
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,14	7 - 8	13,5 +/-2
2.	PDRB Nominal Per Kapita (Jt Rp)	45,26	50,57 - 58,57	54,57 +/-4
3.	Inflasi(%)	4,48	3,5 - 6,0	3,5 - 6,0
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,22	13 - 14	13,69 - 14,09
5.	Pengangguran Terbuka (%)	3,81	3,0 - 3,5	3,39

Sumber: RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021 dan KUA-PPAS Prov Sulteng TA 2018

Dengan tumbuhnya pendapatan dan belanja triwulan I-2018 (yoy) seiring dengan tumbuhnya PDRB (yoy) maka kebijakan fiskal di Sulteng mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan I-2018 dan diharapkan menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sulteng.

C. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tk. Wilayah Prov. Sulteng Tw I-2018:

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
Pendapatan:	1.169.739.558.196
a. Pajak	890.769.444.660
b. Kontribusi sosial	-
c. hibah	-
d. Pendapatan Lain	278.970.113.536
Beban:	2.605.074.351.969
a. Kompensasi Pegawai	1.674.798.943.819
b. Penggunaan Barang dan Jasa	710.286.458.489
c. Konsumsi Aset Tetap	-
d. Bunga	-
e. Subsidi	-
f. Hibah	203.871.257.203
g. Manfaat Sosial	10.055.155.000
h. Beban Lainnya	6.062.537.458
Keseimbangan operasi neto/bruto	(1.435.334.793.773)
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	254.094.089.569
a. Aset Tetap	254.094.089.569
b. Persediaan	-
c. Barang Berharga	-
d. Aset Non Produksi	-
Net Lending/Borrowing	(1.689.428.883.342)
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	8.133.922.012.657
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	8.290.753.248.163
- Domestik	8.290.753.248.163
- Luar Negeri	-
b. Keterjadian Kewajiban	10.325.000.000

- Domestik	10.325.000.000
- Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Kanwil DJPb (diolah)

PDRB Sulawesi Tengah ADHB sebesar Rp34,92 triliun, kontribusi pemerintah terhadap PDRB ADHB sebesar triwulan I-2018 sebesar 4,11 persen dan jika dilihat dari komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp4,104 triliun mempunyai kontribusi sebesar 34,97 persen. Kontribusi pemerintah transaksi aset non keuangan terhadap PDRB ADHB sebesar 0,73 persen jika ditinjau dari komponen PMTB memiliki kontribusi sebesar 1,91 persen.

Kontribusi konsumsi pemerintah, meski memiliki efek jangka waktu yang cukup pendek namun cukup signifikan menggerakkan perekonomian selama triwulan I-2018 sebaliknya meskipun kontribusi pemerintah dari investasi meski hanya sebesar 0,73 persen dari PDRB namun dirasa lebih baik untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

V

BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. 14 Investor Berminat Tanam Modal di Kawasan Ekonomi Khusus

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong masuknya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini terdapat 14 investor yang sudah berminat menanamkan modalnya di kawasan yang diresmikan pada September 2017.

KEK Palu berdiri di atas lahan seluas 15.000 hektare (Ha), di mana per tahun 2017 telah terealisasi hingga 482 Ha. Kawasan ini ditargetkan bisa menggaet investasi senilai Rp12,5 triliun. Sampai dengan bulan Juli 2017 telah terrealisasi mencapai Rp 115 miliar.

Hingga akhir triwulan I tahun 2018, 14 investor yang telah mendaftar dimana 2 industri sudah beroperasi dan satu perusahaan sedang tahap pengerjaan konstruksi.

Dengan adanya KEK Palu yang merupakan kawasan terintegrasi, mampu membuka lapangan kerja sebanyak 51.000 orang namun sampai saat ini baru menyerap 210 orang.

KEK Palu menjadi salah satu KEK yang berada di lokasi strategis karena berada di wilayah utara-selatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga seluruh bahan baku dari Sulawesi bisa masuk ke KEK Palu oleh karena itu dapat dipastikan investor akan mengalami keuntungan.

KEK Palu didukung dengan berbagai fasilitas penunjang, antara lain Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, yang memiliki panjang landasan pacu 3500 m dan kapasitas penumpang sekitar 1.500 orang per hari. Jarak Bandara ke kawasan diperkirakan 23 km.

Selanjutnya, tersedia Pelabuhan Pantoloan dengan kapasitas saat ini 37.000 TEUs, yang ditargetkan dalam pengembangan mencapai 1,2 juta TEUs. Ada pula fasilitas jalan trans Sulawesi Palu - Toli-toli, Palu Outer Ring Road, dan By pass Palu - Parigi. Selain itu, Pemerintah Pusat memfasilitasi pembangunan infrastruktur di KEK Palu dalam upaya menopang daya saingnya, seperti pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan di dalam KEK Palu sepanjang

1600 m. Selain itu juga ada pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta pengadaan sarana dan prasarana untuk perkantoran di KEK Palu.

Perusahaan yang berminat investasi di KEK Palu rata-rata 2 perusahaan hingga saat ini telah ada 40 daftar investor dan telah 14 investor yang telah dikeluarkan izinnya sehingga peningkatan investasi antara Rp1-2 triliun dalam triwulan II tahun 2018.

KEK Palu memiliki potensi pengembangan industri, antara lain untuk sektor pengolahan hasil tambang, rotan, rumput laut, kelapa, dan logistik. Daftar para investor di KEK Palu, di antaranya PT Hongthai International yang bergerak di sektor industri getah pinus. Perusahaan ini akan menggelontorkan investasi senilai Rp13,7 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 110 orang. PT Sofie Agro bergerak dalam pengolahan kelapa yang akan menanamkan modalnya hingga USD 1,38 juta dan menyerap tenaga kerja sekitar 625 orang, Agro Sulteng Group selaku industri karet dan minyak atsiri, ditargetkan nilai investasinya mencapai Rp 300 miliar dan menyerap 450 tenaga kerja, PT Asbuton Jaya Abadi bergerak dalam industri aspal dingin ini bekal menanamkan modalnya sebesar Rp100 miliar dan membuka lapangan kerja sekitar 100 orang dan PT Palembang GMA Refinery Consortium bergerak dalam industri kilang minyak akan berinvestasi hingga Rp133 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 14.000 orang.

Sumber: www.liputan6.com, 21 April 2018

B. Optimis Target Investasi 2018 di Sulteng Tercapai

Berbagai langkah dilakukan untuk menarik minat investor. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng dilakukan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal, serta memberikan data dan informasi penanaman modal.

Perpres No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengharuskan pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dimana Pemprov Sulteng telah membentuk Satgas Percepatan Berusaha dan diharapkan melalui sistem yang ada akan terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan sistem yang ada di BKPM.

Perpres No 91/2017 ini salah satu implementasinya adalah percepatan melalui penerapan izin berusaha terintegrasi (*one single submission*). Terkait *one single*

submission, Sulteng, Kota Batam, dan Kabupaten Purwakarta dijadikan percontohan di Indonesia. Sebab Sulteng telah menggunakan aplikasi e-siidat, yang dinilai sangat layak dikembangkan dengan adanya Perpres 91/2017.

Untuk realisasi investasi di Sulteng secara keseluruhan telah dicapai sebesar Rp22,5 triliun atau 107,6 persen dari target BKPM sebesar Rp21 triliun. Hasil ini menempatkan Sulteng pada urutan 11 se Indonesia dan di peringkat pertama se Sulawesi artinya Sulawesi Tengah menjadi daerah yang meng-support capaian investasi nasional.

Dari nilai investasi, realisasi PMDN sebesar Rp1,9 triliun dan PMA Rp20,6 triliun. Realisasi berdasarkan wilayah, Kabupaten Morowali Rp17,4 triliun, Banggai Rp2,7 triliun, Poso Rp1,5 triliun, Morowali Utara Rp311 Miliar, dan Kota Palu Rp260 miliar.

Untuk sektor bidang usaha yang memiliki nilai realisasi terbesar sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik Rp13,9 triliun. Diikuti industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi Rp3,9 triliun, listrik air dan gas Rp2,9 triliun, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp700 miliar, dan hotel dan restoran Rp2,4 miliar.

Untuk Tahun 2018, BKPM menetapkan target investasi Sulteng Rp20 triliun lebih. Target tersebut diharapkan bisa terealisasi melampaui seperti tahun sebelumnya. Saat ini satu perusahaan penghasil karbon di bawah PT IMIP dalam penyelesaian AMDAL yang akan menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi. Percepatan realisasi investasi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Pengurangan Pajak (*Tax Holiday*) untuk perusahaan yang melakukan investasi baru mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan bagi perusahaan yang berinvestasi minimal Rp500 miliar.

Selain itu percepatan realisasi investasi ditunjang dengan Perpres No 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dimana satu pekerja dapat dipekerjakan di dua perusahaan. Optimisme investasi Sulteng juga datang dari zona kawasan ekonomi KEK Palu yang saat ini sudah ada 13 investor diharapkan bisa direalisasikan di tahun 2018 ini.

Sumber: <https://radarsultengonline.com>, 13 April 2018



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jalan Tanjung Dako Nomor 15 Palu 94112

Telephone : (0451) 422924-454040

Faxsimile : (0451) 422936

Email : kanwil24palu@yahoo.com